

LAPORAN TAHUNAN

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga laporan tahunan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023 dapat tersusun. Laporan tahunan Deputi Bidang Ketersediaan Pangan disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pemerintah. Laporan ini berisi capaian kinerja ketahanan pangan tahun 2023 dan relisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Hasil yang telah dicapai selama tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan pangan di masa yang akan datang.

Selama melaksanakan program dan kegiatan dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan tentunya banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Namun atas kerja keras semua pihak dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan capaian program dan kegiatan dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan dapat berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan tahunan kedepan sangat berarti bagi kami.

Akhir kata saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyusunan laporan tahunan ini masih banyak kekurangan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
BAB II GAMBARAN UMUM	2
2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
2.2. Struktur Organisasi	2
2.3. Visi dan Misi dan	3
2.4. Tujuan	4
2.5. Sasaran	4
2.6. Arah Kebijakan dan Strategi	5
2.7. Kegiatan Utama	6
2.8. Kerangka Regulasi	6
BAB III CAPAIAN KINERJA KETAHANAN PANGAN	8
3.1. Inflasi Pangan Bergejolak	8
3.2. Prognosa Neraca Pangan Strategis	10
3.3. Pengendalian Ekspor dan Impor Pangan	11
3.4. Neraca Bahan Makanan	12
3.5. Survey Stok Beras dan Jagung Akhir Tahun 2023	13
3.6. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	14
3.7. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan	23
3.8. Fasilitasi Distribusi Pangan	24
3.9. Gerakan Pangan Murah	25
3.10. Pemantauan Harga di Tingkat Produsen dan Tingkat Konsumen	26
3.11. Capaian Kinerja Keuangan	29
..	
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	15
Tabel.2	Regulasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15
Tabel 3	Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan CPP	16
Tabel 4	Realisasi Penyaluran CPP Bantuan Pangan Beras	17
Tabel 5	Realisasi Penyaluran CPP SPHP Beras	18
Tabel.6	Realisasi Penyelenggaraan CPP Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat	18
Tabel 7	Realisasi Penyaluran CPP Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam.....	19
Tabel 8	Realisasi Pengadaan Gabah/Beras CPP	20
Tabel 9	Realisasi Penyaluran CBP	21
Tabel 10	Realisasi Pengadaan CPP.....	
Tabel 11	Perkembangan Alokasi Anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	30
Tabel 12	Realisasi Anggaran Direktorat Lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.....	3
Gambar 2	Tingkat Inflasi Tahun 2022	8
Gambar 3	Prognosa Neraca Pangan Strategis 2023	11
Gambar 4	Desain Tata Kelola Neraca Pangan.....	10
Gambar 5	Stok Pangan Perum Bulog dan ID Food.....	19
Gambar 6	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	22
Gambar 7	Sarana dan Prasarana Logistik Pangan.....	23
Gambar 8	Mobilisasi Pangan dengan Fasilitasi Distribusi Pangan	25
Gambar 9	Gerakan Pangan Murah (GPM)	26
Gambar 10	Panel Harga Pangan.....	27
Gambar 11	Harga Pangan Tingkat Produsen	28
Gambar 12	Harga Pangan Tingkat Konsumen	29

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan unit kerja Eselon I dibawah Badan Pangan Nasional. Sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan kebijakan distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Distribusi dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Dalam konteks kemandirian pangan, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kecukupan ketersediaan pangan yang diutamakan dari produksi dalam negeri. Untuk menjamin ketersediaan pangan setiap waktu dan wilayah diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan. Cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan stabilisasi pangan adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya ancaman krisis pangan, konflik geo politik dan perubahan iklim. Dalam rangka menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan mendukung terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan yang merupakan visi Badan Pangan Nasional.

1.2. Tujuan

Laporan Tahunan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bertujuan untuk menggambarkan target dan capaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2023.

BAB II. GAMBARAN UMUM

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b) Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan;
- c) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- d) Pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

2.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan memiliki susunan organisasi terdiri atas:

1. Direktorat Ketersediaan Pangan;
2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
4. Sub Bagian Tata Usaha

Struktur organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

2.3. Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 adalah “Terwujudnya Tatakelola Sistem Pangan Nasional Yang Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan untuk Mencapai Ketahanan Pangan Yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”.

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Pangan Nasional telah menetapkan misi, sebagai berikut:

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

2.4. Tujuan

Dalam mencapai misi tersebut, maka tujuan/milestone Milestone kedeputan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, adalah :

- a. Penguatan cadangan/stok pangan nasional
- b. Pengendalian ekspor dan impor pangan
- c. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan
- d. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah
- e. Penguatan sistem logistik pangan nasional
- f. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen
- g. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan

2.5. Sasaran

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional yang fokus dalam mencapai:

- a. Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan.
- b. Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah.
- c. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengampu Sasaran Strategis (SS) 1 yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dan Sasaran Strategis (SS) 2 yaitu Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang merupakan target pencapaian Badan Pangan Nasional.

Indikator kinerja mendukung SS 1 dan SS 2 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah: SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal, yaitu : 1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan. 2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan. 3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap

target yang direkomendasikan. 4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan.

Indikator Kinerja SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yaitu : 1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% (lima persen) di bawah dan/atau 10% (sepuluh persen) diatas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian. 2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% (sepuluh persen) diatas HAP/HET/Harga Keekonomian. 3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% (sepuluh persen). 4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% (sepuluh persen). 5. Inflasi pangan berkejang. Indikator kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan merupakan alat ukur dalam mendukung pencapaian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional.

2.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya. Namun demikian lingkup arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;
2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan;
4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

2.4.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan strategi:

1. Penguatan sistem logistik pangan nasional;
2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan;
4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD di Bidang Pangan)).

2.5. Kegiatan Utama

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran Badan Pangan Nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebagai berikut:

2.5.1. Rancangan Kegiatan Utama

Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan
2. Penyusunan Neraca Pangan
3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor
4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
5. Analisis Data dan Informasi Harga Pangan
6. Penetapan Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan
8. Pengembangan Sistem Logistik Pangan
9. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

2.6. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

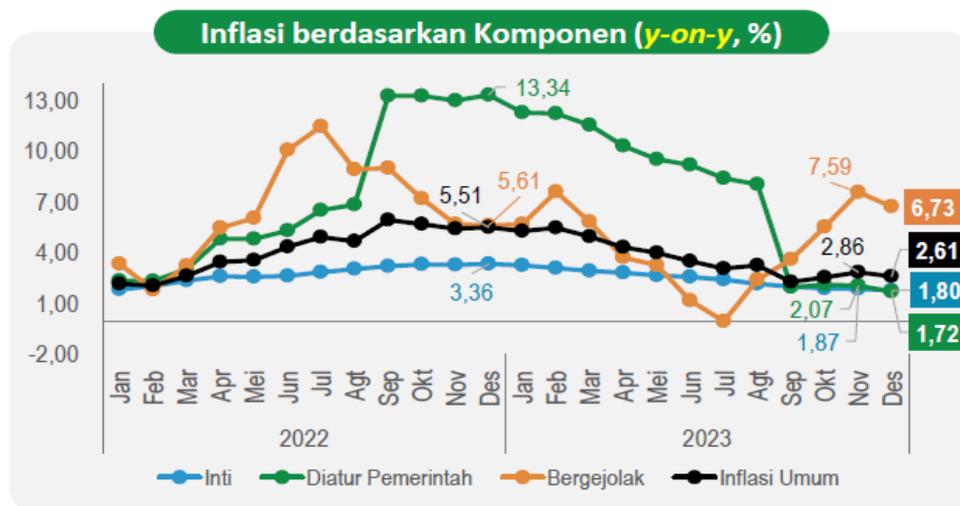
Kebutuhan kerangka regulasi secara garis besar mengatur terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

BAB III. PENCAPAIAN KINERJA

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator kinerja sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2023. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024. Standar kinerja ini merupakan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional atas target kinerja dalam mendukung pencapaian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional tahun 2023.

3.1. Inflasi Pangan Bergejolak

Indikator ini menggambarkan situasi Inflasi pangan bergejolak dalam hal ini **Volatile Food (VF)** atau inflasi pangan bergejolak pada Tahun 2023 (*y-on-y*). Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 2 Januari 2024, inflasi pangan bergejolak (*y-on-y*) bulan Desember 2023 sebesar 6,73%. Penyumbang inflasi pangan pada 2023 antara lain disebabkan oleh komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras. Perkembangan inflasi pangan bergejolak mulai tahun 2023 dan September 2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Tingkat Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2023

Target Tahun 2023 sebesar $4\pm 1\%$ artinya besaran inflasi VF yang diperkenankan berada pada kondisi stabil antara 3% sampai dengan 5%. Capaian Inflasi VF tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2023 inflasi VF sebesar 5,61% dengan capaian kinerja 87,80% dengan kategori baik. Begitu pula apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah tahun 2024 sebesar $4\pm 1\%$ capaian kinerja masih belum berhasil. Belum tercapainya indikator inflasi pangan bergejolak disebabkan karena fluktuasi harga pangan pada saat ini yang disebabkan berbagai hal antara lain gangguan produksi pangan akibat dampak *el nino*, perubahan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap harga pangan dunia, kebijakan restriksi ekspor pangan sejumlah negara yang membatasi ekspor pangan, kenaikan biaya input produksi dan lain sebagainya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka pengendalian inflasi sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
- b. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi).
- d. Pelaksanaan Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung.
- e. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f. Koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Inflasi Pangan (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis agar inflasi sesuai target tetap sesuai target antara lain:

- a. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi.
- b. Mengintensifkan pelaksanaan GPM, FDP, dan SPHP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga.
- c. Mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan antar daerah.

- d. Memperkuat koordinasi TPIP dan TPID dalam rangka pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

3.2. Prognosa Neraca Pangan Strategis

Prognosa neraca pangan merupakan informasi tentang kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan yang disusun dalam format bulanan. Penyusunan prognosa neraca pangan dimulai dari penghitungan perkiraan kebutuhan pangan selama satu tahun ke depan sebagai acuan dalam menentukan ketersediaan pangan serta perumusan langkah-langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan data dan informasi prognosa pangan sangat dibutuhkan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Penghitungan prognosa neraca pangan dilakukan dengan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan diperhitungkan dari stok awal, produksi dalam negeri, impor pangan dan ekspor pangan, sedangkan kebutuhan pangan diperhitungkan dari kebutuhan pangan rumah tangga dan kebutuhan pangan non rumah tangga. Penghitungan kebutuhan pangan rumah tangga memperhitungkan jumlah penduduk tahun berjalan. Penghitungan kebutuhan non rumah tangga terdiri dari kebutuhan pangan untuk benih/bibit, penyedia jasa makan dan minum (restoran, warung, katering, kafe), hotel, dan untuk industri, baik industri pangan dan non pangan, seperti industri pakan, kosmetik dan lain-lain. Dalam kebutuhan ini perlu diperhitungkan juga pangan yang hilang atau tercecer.

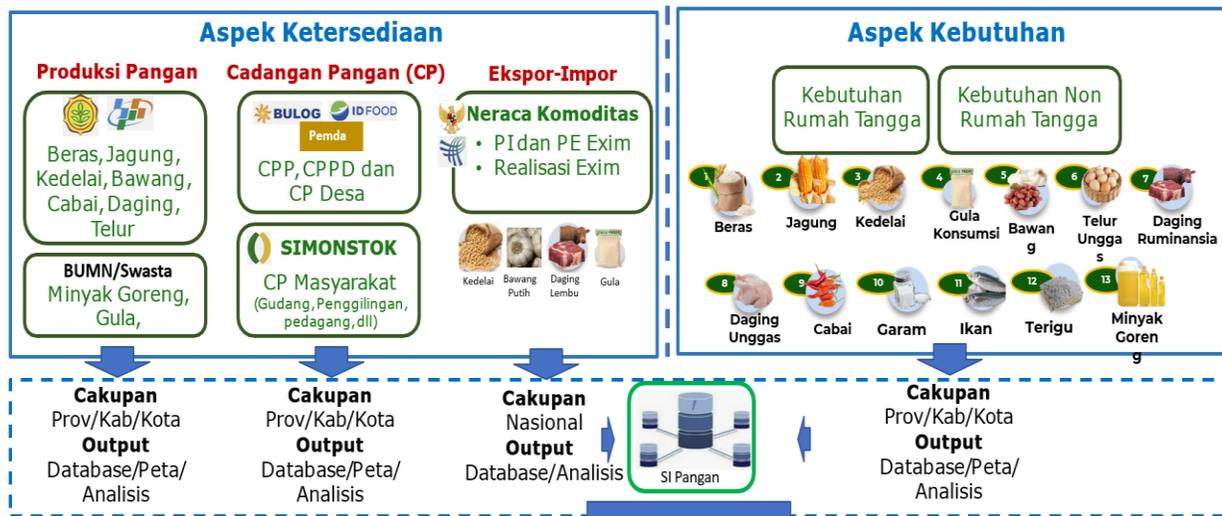
Uraian	Ket	Beras	Jagung	Kedelai	Bawang Merah	Bawang Putih	Cabai Besar
Stok Awal 2024	A	4.134.399 a)	956.330	185.343 b)	26.377 d)	50.606 c)	52.898 d)
Susut/Tercecer	B				59.823	5.519	229.818
Perkiraan Produksi Jan-Mei 2024	C	18.721.932	7.754.935	128.519	803.566	12.810	770.311
Realisasi Impor Jan-Mar 2024	D	2.220.008	836.771	1.124.145	0	165.078	0
Rencana Impor Apr-Mei 2024	E	550.170	231.219	422.809	0	141.419	0
Realisasi Ekspor Jan-Mar 2024	F	0	295	1.075	1,04	3,72	0
Rencana Ekspor Apr-Mei 2024	G	0	0	270	0	0	0
Total Ketersediaan Jan-Mei 2024	H=A-B+C+D+E-F-G	25.626.509	9.778.960	1.859.470	770.119	364.390	593.391
Kebutuhan Jan-Mei 2024	I	18.217.236	7.847.656	1.546.479	690.442	345.198	578.201
Kebutuhan Bulan Juni	J	2.632.978	1.293.403	216.038	91.372	64.755	83.156
Kebutuhan Harian Bulan Juni	K=J/30	84.935	41.723	6.969	2.947	2.089	2.682
Stok Akhir Mei 2024	L=H-I	7.409.273	1.931.304	312.991	79.677	19.192	15.190
Ketahanan Stok (Hari)	M=L/K	87	46	45	27	9	6

Uraian	Ket	Cabai Rawit	Daging Sapi-Kerbau	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Konsumsi	Minyak Goreng
Stok Awal 2024	A	15.512 d)	96.756	122.898	69.873	1.030.017 a)	360.000
Susut/Tercecer	B	207.873					
Perkiraan Produksi Jan-Apr 2024	C	826.119	332.240	2.273.426	3.689.832	973.507 f)	3.196.295
Realisasi Impor Jan-Feb 2024	D	0	51.425	0	0	399.240	0
Rencana Impor Mar-Apr 2024	E	0	170.223	0	0	0	0
Realisasi Ekspor Jan-Feb 2024	F	0	0	0	0	0	0
Rencana Ekspor Mar-Apr 2024	G	0	0	0	0	0	0
Total Ketersediaan Jan-Apr 2024	H=A-B+C+D+E-F-G	633.758	650.644	2.396.324	3.759.705	2.402.764	3.556.295
Kebutuhan Jan-Apr 2024	I	574.270	538.311	2.172.033	3.664.928	1.714.557	3.209.851
Kebutuhan Bulan Juni	J	82.395	56.890	313.031	119.522	246.888	461.517
Kebutuhan Harian Bulan Juni	K=J/31	2.658	1.835	10.098	3.856	7.964	14.888
Stok Akhir April 2024	L=H-I	59.488	112.333	224.291	94.777	688.208	346.444
Ketahanan Stok (Hari)	M=L/K	22	61	22	25	86	23

Sumber: BPS, Kementan, Kemendag, dan SINAS-NK Kemenko Perekonomian diolah Badan Pangan Nasional

Gambar 3. Prognosa Neraca Pangan Strategis 2023

Prognosa neraca pangan mulai disusun pada bulan Januari setiap tahunnya, dan selanjutnya prognosa tersebut dievaluasi dan disempurnakan setiap bulan sesuai dengan perubahan/update angka potensi produksi dari Badan Statistik Pusat (BPS) dan/atau Direktorat Jenderal (Ditjen) Teknis Kementerian Pertanian serta K/L terkait lainnya. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional telah mengembangkan desain tata kelola data ketersediaan pangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing seperti gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 4. Desain Tata Kelola Neraca Pangan

3.3. Pengendalian Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan

Kebijakan impor pangan merupakan solusi terakhir disaat produksi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara permintaan pangan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan pangan.

Pengendalian ketersediaan pangan juga mulai dititikberatkan pada komoditas yang masih mengandalkan impor atau komoditas pangan prioritas yang menjadi mandat Perpres 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Badan pangan telah berpartisipasi aktif pada penetapan Neraca Komoditas tahun 2024, yang hasilnya telah ditetapkan melalui Rakortas setingkat Menteri pada tanggal 9 Desember dan 13 Desember 2023. Komoditas pangan yang disusun dan diusulkan untuk ditetapkan neraca komoditasnya adalah beras, jagung, daging lembu, gula konsumsi dan bawang putih. Selain itu, Badan Pangan Nasional telah diberikan mandat untuk menetapkan kebutuhan dan memverifikasi kebutuhan pelaku usaha khusus untuk beras khusus. Agar mekanisme penetapan kebutuhan komoditas pangan impor dapat dikendalikan dengan baik, Badan Pangan Nasional baru saja menerbitkan Perbadan 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Ekspor dan Impor Pangan. Melalui Perbadan tersebut diharapkan pengendalian ketersediaan pangan akan semakin kuat. Lebih khusus data dan informasi tentang ketersediaan pangan strategis semakin akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan dibidang pangan.

3.4. Neraca Bahan Makanan

Neraca Bahan Makanan (NBM) menyajikan data dan informasi yang menggambarkan tentang penyediaan/pengadaan (supply) dan penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). Selain itu, NBM memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya dalam bentuk volume maupun zat gizi.

Neraca Bahan Makanan mencakup 150 komoditas termasuk produk turunannya yang dikelompokkan menjadi 11 kelompok bahan makanan. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Teknis Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Litbang Kementerian Kesehatan, Kementerian perdagangan, dan Badan Urusan Logistik.

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari pada tahun 2023 dalam bentuk energi sebesar 3.494 kkal, angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka ketersediaan tahun 2022 sebesar 3.288 kkal. Peningkatan terjadi karena kontribusi energi dari kelompok daging, telur, ikan serta minyak dan lemak.

Sementara Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk protein pada tahun 2023 sebesar 78,89 gram yang berasal dari protein nabati 52,29 gram dan protein hewani 26,60 gram. Angka tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2022, yaitu 79,99 gram (54,10 gram protein nabati dan 25,88 gram protein hewani). Berdasarkan hasil analisis NBM tahun 2023 terhadap target IKU, Target AKE (Angka Kecukupan Energi) tahun 2023 sebesar 3.011 kkal, realisasi sebesar 3.494 kkal maka rasio AKE terhadap target sebesar 116,04%. Target AKP (Angka Kecukupan Protein) tahun 2023 sebesar 86,93 gram, realisasi sebesar 78,89 gram maka rasio AKP terhadap target sebesar 90,75%.

Secara umum ketersediaan energi dan protein tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan energi dan protein total masih didominasi oleh kelompok bahan pangan nabati. Pada tahun 2023 kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi sebesar 92,29% dan protein sebesar 66,28%. Kontribusi terbesar ketersediaan energi

dan protein total tahun -2023 berdasarkan kelompok bahan makanan didominasi oleh kelompok padi-padian masing masing sebesar 39,10% - 45,02% dan 42,53%-47,92%.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan yang menggambarkan keragaman penyediaan pangan tahun 2023 sebesar 98,92 mengalami peningkatan dari Skor PPH tahun 2022 sebesar 95,86. Namun demikian, skor PPH tahun 2023 untuk kelompok pangan hewani masih di bawah rekomendasi ideal, yaitu 24.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan energi dan protein serta PPH ketersediaan antara lain: a. Peningkatan ketersediaan kelompok pangan hewani, yaitu daging, telur, susu dan ikan dari produksi dalam negeri. b. Peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan hewani alternatif seperti daging ayam, telur, dan ikan yaitu berupa kacang-kacangan. c. Mengoptimalkan produksi sumber alternatif dari padi-padian yang berasal umbi umbian perlu terus dioptimalkan. d. Peningkatan produksi kelompok sayur dan buah, dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan marginal, ruang terbuka, dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal.

3.5. Survey Stok Beras dan Jagung Akhir Tahun 2023

Kegiatan pendataan survey stok beras dan jagung dilakukan untuk mengetahui posisi stok beras dan jagung pada akhir tahun 2023. Informasi stok beras sangat penting untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Persiapan survey stok beras dan jagung akhir tahun 2023 dimulai dengan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pusat Statistik dengan Badan Pangan Nasional pada tanggal 1 Desember 2023, dan ditindaklanjuti penyusunan metodologi survey dengan menghasilkan sampel sebanyak 54.660 responden dengan tingkat RSE 15%. Tingkat RSE 15% ini jauh lebih baik dibandingkan survey stok beras tahun 2023 sebesar 25%. Diharapkan dengan Tingkat RSE yang semakin baik maka hasil survey stok beras dan jagung tahun ini menghasilkan estimasi data yang semakin baik pula.

Survey stok beras dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 di 38 Provinsi dan 477 kabupaten/kota, melalui pendekatan *Probability Sampling*. Sasaran sampel antara lain Rumah Tangga Produsen, Rumah Tangga Konsumen, Penggilingan, Pedagang, Hotel Restoran dan Katering serta Industri dengan jumlah total 46.378 sampel.

Untuk survey stok jagung dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 di 38 Provinsi dan 457 kabupaten/kota, melalui pendekatan *Probability Sampling*. Sasaran sampel antara lain 1) Rumah Tangga terdiri dari Rumah Tangga Konsumen (Peternak Mandiri) dan Rumah Tangga Produsen; 2) Non Rumah Tangga terdiri dari pemipilan jagung, perdagangan, industri, dan Bulog, dengan jumlah total 8.282 sampel.

Pendataan survey stok beras dan jagung akhir tahun melibatkan pihak ketiga, yaitu PT. Secufindo. PT. Secufindo ini terlibat dalam menyediakan petugas enumerator, yang kemudian enumerator mendapatkan Bimbingan Teknis dari Badan Pusat Statistik yang difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional. Sedangkan BPS selain memberikan bimbingan teknis juga dilibatkan dalam perhitungan dan penetapan sampel, verifikasi, pengolahan dan analisis data. Pengumpulan data stok beras dan jagung akhir 2023, dilaksanakan pada bulan Januari 2024 serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan survey stok beras dan jagung akhir tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan angka riil stok beras dan jagung akhir tahun 2023 sehingga dapat dilakukan penyesuaian kembali angka prognosa neraca beras dan jagung yang telah disusun dalam satu tahun. Dengan pelaksanaan survey ini maka hasil yang diharapkan dapat mendekati akurasi ketersediaan beras dan jagung pada akhir tahun yang akan digunakan sebagai *carry over* awal tahun 2024.

3.5. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Berdasarkan Perpres 66/2021, salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas.

Dalam Perpres 66/2021 ditetapkan komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional meliputi 9 komoditas: beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan telur. Pada Tahun 2023 telah tersusun regulasi penyelenggaraan CPP sembilan komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan gula konsumsi. Upaya penyelesaian regulasi CPP dapat tercapai lebih cepat karena didukung oleh koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring evaluasi, dan pelaporan distribusi dan cadangan pangan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder. Disamping itu, adanya penugasan untuk penyaluran CPP bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur) turut mendorong percepatan penyusunan regulasi CPP.

Penyaluran CPP Tahun 2023 sudah lebih terukur dengan diperluasnya penyaluran CBP untuk SPHP dan bantuan pangan. Rangkaian kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, sebagai bentuk implementasi terhadap amanah presiden tersebut, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan: 1) penyusunan regulasi Badan Pangan Nasional tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sebagai turunan dari pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Perpres 125/2022; 2) penyaluran cadangan pangan

pemerintah untuk pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), serta 3) pemantauan stok dan/atau cadangan pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan.

3.6.1 Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Pada Tahun 2023 telah diterbitkan 7 (tujuh) Peraturan Badan Pangan Nasional yang terkait dengan penyelenggaraan CPP sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

No	Waktu Penyusunan	Komoditas CPP	Regulasi	Tentang
1	Triwulan IV 2022	Beras	Perbadan No 12 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah
2		Jagung	Perbadan No 13 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah
3		Kedelai	Perbadan No 14 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah
4	Triwulan III 2023	Gula konsumsi	Perbadan No 4 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah
5	Triwulan III 2023	oDaging Unggas oDaging Ruminansia	Perbadan No 5 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah
6	Triwulan II 2023	Telur Unggas	Perbadan No 10 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah
7	Triwulan IV 2023	oBawang oCabai	Perbadan No 28 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah

Disamping regulasi penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas, pada Tahun 2023, Badan Pangan Nasional juga telah menyusun regulasi yang menjadi dasar penyaluran CPP yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Regulasi Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

No	Waktu Penyusunan	Regulasi	Tentang
1	Triwulan II 2023	Perbadan No 9 Tahun 2023	Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
2	Triwulan IV 2023	Perbadan Nomor 30 Tahun 2023 tentang	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

Selanjutnya, untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional yang merupakan turunan dari Perbadan. Pada Tahun 2023 telah disusun 7 (tujuh) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Tentang Penyelenggaraan CPP.

No	Waktu Penyusunan	Regulasi	Tentang
1	Triwulan I 2023	Kepbadan No 2 Tahun 2023	Jumlah, Standar Mutu, dan HPP Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah
2	Triwulan I 2023	Kepbadan No 3 Tahun 2023	Jumlah, Standar Mutu, dan HPP Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah
3	Triwulan I 2023	Kepbadan No 4 Tahun 2023	Jumlah, Standar Mutu, dan HPP Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah
4	Triwulan I 2023	Kepbadan No 70 Tahun 2023	Jenis Pangan, Jumlah dan Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023
5	Triwulan I 2023	Kepbadan No 71 Tahun 2023	Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023
6	Triwulan IV 2023	Kepbadan No 353 Tahun 2023	Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap Kedua Tahun 2023
7	Triwulan IV 2023	Kepbadan No 379.1 Tahun 2023	Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah. Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024

Penyusunan regulasi CPP dilaksanakan melalui serangkaian rapat koordinasi dan pertemuan harmonisasi yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Perum BULOG, ID FOOD serta Perwakilan Biro, Inspektorat, Direktorat Lingkup Badan Pangan Nasional.

3.6.2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, selama Tahun 2023 Badan Pangan Nasional melaksanakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dimaksud terdiri dari rincian sebagai berikut:

- 1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan berupa Beras melalui Perum BULOG kepada 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) masing-masing 10 kg/bulan selama 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada Maret sampai dengan Mei dan Tahap II dilaksanakan Bulan September sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan beras yang telah tersalur sebesar 1.489.639.960 kg.

Tabel 4. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan (Komoditas Beras)

No	Waktu Pelaksanaan		Sasaran (KPM)	Kuantum Beras (kg)
1	Triwulan I & II 2023	Tahap I (Mar s.d.Mei)	21.353.000	635.788.200
2	Triwulan III & IV 2023	Tahap II (Sept s.d. Des)	21.353.000	853.851.760
Jumlah			21.353.000	1.489.639.960

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Komoditas Beras dan Jagung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyaluran SPHP Beras dilakukan pada Tingkat Konsumen selama Bulan Januari hingga Desember 2023 sebesar 1.196.727.007 kg (110,30% dari target total SPHP sebesar 1.085.000.000 kg) dan
 - b. Penyaluran SPHP Jagung dilakukan terhadap Peternak Mandiri yang baru dimulai pada awal bulan November, sehingga per 31 Desember 2023 baru disalurkan sebesar 27.631.992 kg (14% dari target total 195.475.170 kg). Pelaksanaannya akan dilanjutkan pada Tahun 2024 hingga 31 Januari 2024 sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG.

Tabel 5. Realisasi Penyaluran CPP untuk SPHP

No	Waktu Pelaksanaan	Kuantum Beras (kg)	Kuantum Jagung (Kg)
1	Triwulan I 2023	554.534.880,88	-
2	Triwulan II 2023	54.782.244,40	-
3	Triwulan III 2023	188.037.881,50	-
4	Triwulan IV 2023	399.372.000,00	27.631.992
Jumlah		1.196.727.006,78	27.631.992

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat melalui Perum BULOG yang telah dilaksanakan hingga Bulan September 2023 dengan besaran bantuan yang telah tersalurkan sebanyak 2.302.476.600 kg.

Tabel 6. Realisasi Penyaluran CPP untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat

No	Waktu Pelaksanaan	Kuantum Beras (kg)
1	Triwulan I 2023	1.147.198,30
2	Triwulan II 2023	595.373,90
3	Triwulan III 2023	559.904,40
4	Triwulan IV 2023	-
Jumlah		2.302.476,60

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan berupa Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui ID FOOD kepada 1,44 juta Keluarga Rentan Stunting (KRS) masing-masing 1 paket terdiri dari 1 kg daging ayam dan 1 pak atau 10 butir telur ayam selama 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada April sampai dengan Juni dan Tahap II dilaksanakan Oktober sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan daging ayam dan telur ayam yang telah tersalur selama Tahun 2023 sebanyak 8.512.724 kg daging ayam dan 8.514.102 pack telur ayam.

Tabel 7. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan (Komodiats Daging dan Telur Ayam)

No	Waktu Pelaksanaan		Sasaran (KRS)	Kuantum Daging (kg)	Kuantum Telur (pack)
1	Triwulan II 2023	Tahap I (Apr s.d.Juni)	1.446.089	4.174.457	4.175.835
2	Triwulan IV 2023	Tahap II (Okt s.d. Des)	1.446.089	4.338.267	4.338.267
Jumlah			1.446.089	8.512.724	8.514.102

Sumber: ID FOOD diolah Bapanas, 2023

Seluruh data penyaluran CPP baik untuk pemberian bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan maupun penyaluran untuk penanggulangan bencana alam bersumber dari laporan pelaksanaan penyelenggaraan CPP oleh Perum BULOG dan ID FOOD sebagai operator pelaksana penugasan dari Badan Pangan Nasional.

3.6.3. Pemantauan Stok Pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan

Untuk memperkuat perencanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPP, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan pemantauan stok CPP dan Stok Komersial yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD). Pelaporan stok disajikan setiap hari dalam bentuk infografis sebagai berikut.



Gambar 5. Stok Pangan di Perum Bulog dan ID FOOD

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 02/HK.02.05/K/1/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2023 minimal sebesar 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2023 minimal sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG, stok CBP pada akhir tahun 2022 yang tercatat pada 31 Desember 2022 sebesar 326.643 ton, dimana CBP ini akan menjadi stok awal di Tahun 2023. Pengadaan gabah dan/atau beras untuk CBP selama Tahun 2023 sebesar 3.810.720 ton, pengadaan dalam negeri sebesar 849.662 dan pengadaan dari luar negeri sebesar 1.531.453 ton. Total stok CBP yang dikelola sampai dengan Desember sebesar 3.810.720 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh) ton. Secara rinci pengadaan gabah/beras tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Pengadaan Gabah/Beras untuk CBP Bulan Oktober-Desember 2023

No.	Bulan	Pengadaan		Jumlah (Ton)
		Dalam Negeri	Luar Negeri	
1.	Stok Akhir Tahun 2022			326.643
2.	Januari	6.921	240.955	247.876
3.	Februari	6.774	83.444	90.218
4.	Maret	80.605	111.041	191.646
5.	April	202.000	70.900	272.900
6.	Mei	268.417	254.788	523.205
7.	Juni	127.854	155.674	283.528
8.	Juli	69.875	249.363	319.238
9.	Agustus	41.339	225.449	266.788
10.	September	45.877	139.839	185.716
11.	Oktober	46.311	321.246	367.557
12.	November	65.880	425.246	491.126
13.	Desember	105.738	465.185	570.923
Total Pengadaan CBP Jan-Des 2023		1.067.591	2.743.130	3.810.721

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

Penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi,

dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Pada periode bulan Januari-Desember 2023, CBP telah disalurkan untuk keperluan: 1) stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), 2) golongan anggaran, dan 3) bantuan pangan. Total keseluruhan penyaluran CBP Januari-Desember 2023 sebanyak 2.928.436 ton. Secara rinci penyaluran CBP tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Penyaluran CBP Bulan Oktober-Desember 2023

No.	Penyaluran	Bulan			Jumlah (Ton)
		Okt	Nov	Des	
	Total Penyaluran Jan-Jun				1.864.616
1.	SPHP	88.013	113.604	197.755	399.372
2.	Bencana Alam	-	-	-	-
3.	Golongan Anggaran	8.562	8.808	9.828	27.198
4.	Bantuan Pangan Tahap II	210.990	217.360	208.900	637.250
Total Penyaluran Oktober-Desember					1.063.820
Total Penyaluran Januari-Desember					2.928.436

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

Monitoring Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi rencana aksi Badan Pangan Nasional. Kriteria keberhasilan dengan output terselenggaranya pengadaan dan penyaluran CBP sesuai target. Sedangkan ukuran keberhasilan dengan output 2,4 juta ton. Ukuran keberhasilan bulanan, dimana target B04 sebesar 400.000 ton, target B06 sebesar 1.200.000 ton, target B09 sebesar 1.800.000 ton, dan target B12 sebesar 2.400.000 ton. Data dukung yang digunakan adalah data pengadaan dari Perum BULOG.

Berdasarkan data Perum BULOG per Desember 2023 atau B12 telah dilakukan pengadaan gabah/beras untuk CBP sebanyak 3.810.720 ton. Sedangkan untuk penyaluran CBP periode bulan Januari-September 2023 sebesar 2.928.436 ton. Penyaluran CBP dilakukan untuk: 1) stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), 2) bencana alam, 3) golongan anggaran, dan 4) bantuan pangan.

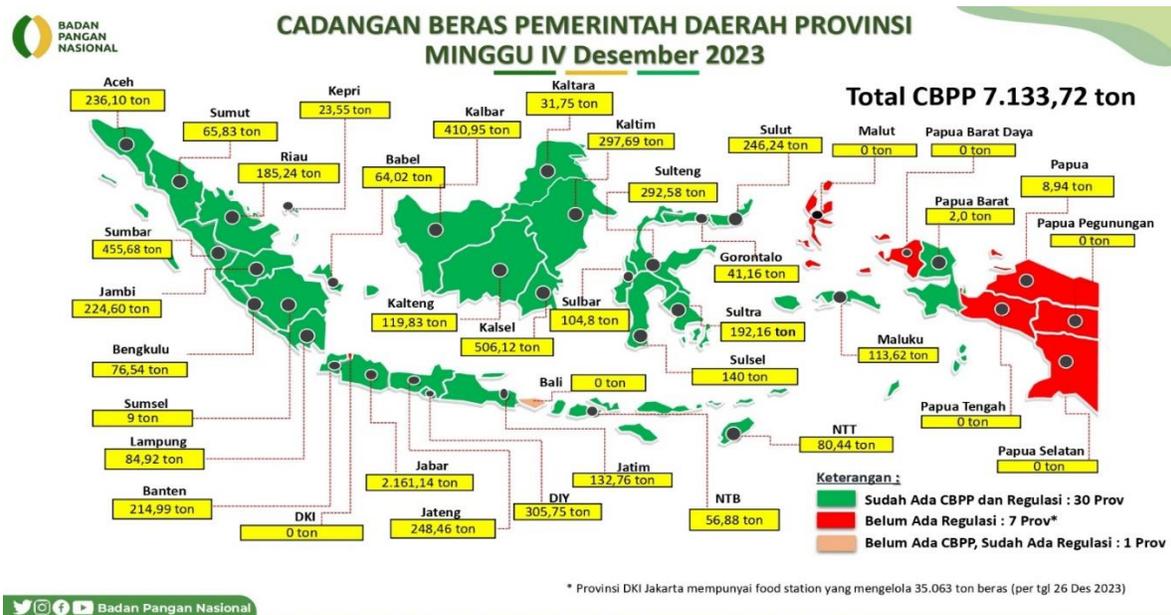
Secara akumulatif total pengelolaan CBP (pengadaan dan penyaluran) Bulan Januari-Desember 2023 oleh Perum BULOG sebesar 6.739.156 ton. Jumlah ini jauh di atas target B12 yakni sebesar 1.800.000 ton. Secara rinci pengelolaan CBP tersaji pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian Rencana Aksi Badan Pangan Nasional

No.	Rincian	Jumlah (ton)
1	Pengadaan Januari-Desember 2023	3.810.720
2.	Penyaluran Januari-Desember 2023	2.928.436
3.	Total Pengelolaan CBP Jan-Des 2023	6.739.156
4.	Target Renaksi B12	2.400.000
5.	Capaian	280%

3.6.4. Updating Data dan Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Updating database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap minggu oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin harian baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id), per 29 Desember 2023, cadangan pangan pemerintah daerah provinsi saat ini baru berupa cadangan beras pemerintah daerah, dengan rincian stok per minggu ke IV Desember 2023 dengan total sebesar 7.133,72 ton tersebar di 30 provinsi. 7 (tujuh) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua. Sedangkan Provinsi Bali sudah memiliki regulasi, namun belum memiliki CBPP. Secara rinci dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut:



Gambar 6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana provinsi, pelaporan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota juga masih berupa komoditi beras dengan total yang dilaporkan pada web sigap nasional sebesar 12.597,36 ton.

3.6. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

Berdasarkan Rencana Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024, menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pangan dangizi, salah satunya menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan.

Untuk penguatan sistem logistik pangan nasional perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan. Sarana dan prasarana logistik pangan sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan nasional serta menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan secara berkelanjutan. Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*) dan produksi bersifat musiman tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Sementara itu, kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan, infrastruktur logistik, dan transportasi yang kurang memadai serta preferensi masyarakat terhadap pangan yang sangat beragam juga menjadi dasar pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mempertahankan kualitas pangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana dan prasarana logistik pangan tahun 2023, Badan Pangan Nasional kembali memperkuat penyediaan fasilitas sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara sebanyak 11 (sebelas) unit berupa untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Sebaran lokasi sarana dan prasana logistik pangan sebagaimana peta dibawah ini.



Gambar 7. Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

Kegiatan penguatan sarpras 2023 dilakukan dalam tahap penyiapan longlist usulan CPCL, sosialisasi, serta koordinasi dengan dinas pangan provinsi untuk penjangkaran CPCL. Tahun Anggaran 2023 sarana dan prasarana logistik pangan dengan rincian sebagai berikut:

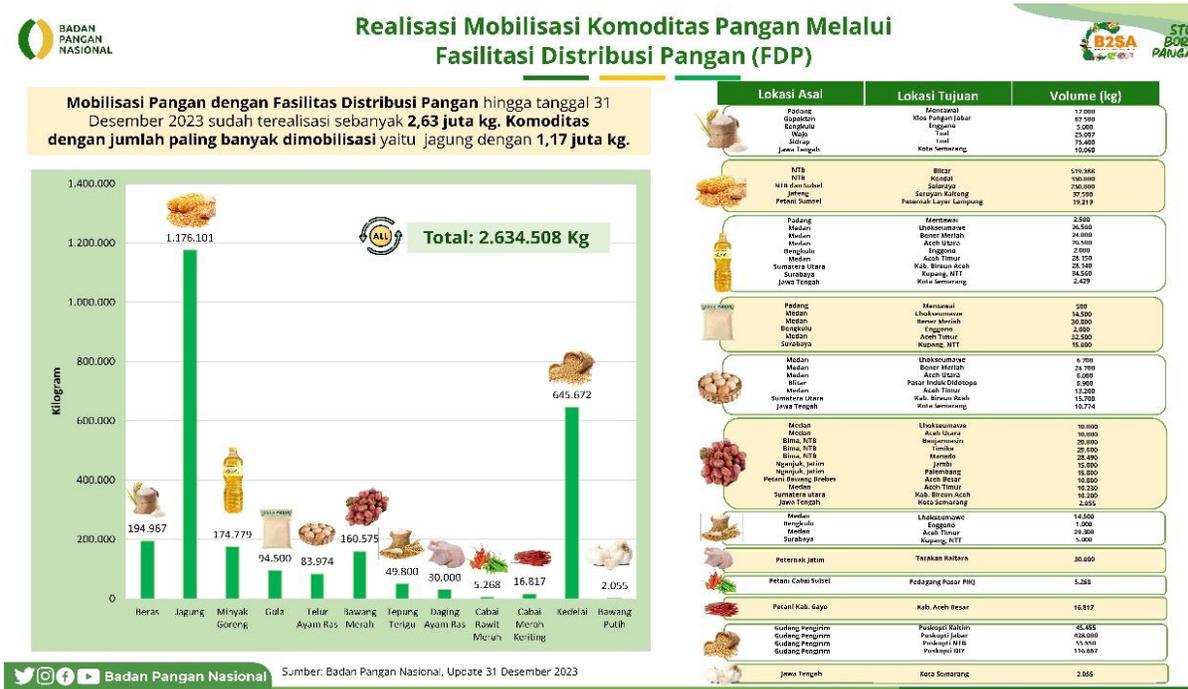
1. 1 unit Heat Pump Dryer di Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Kota Medan, Sumatera Utara,
2. 1 unit Cold Storage Cabai Merah di PT Pembangunan Kerpri, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
3. 1 unit Cold Storage Daging Unggas di CV Harapan Baru Farm, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan;
4. 1 unit Cold Storage Daging Unggas di Perumda Varia Niaga, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
5. 1 unit Air Blast Freezer di PT Berlian Mitra Unggas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
6. 1 unit Air Blast Freezer di RPH Tamarunang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
7. 1 unit Air Blast Freezer di PT Janu Putra Sejahtera, Kota Yogyakarta, DIY Yogyakarta;
8. 1 unit Reefer Container di PT Gieb Indonesia, Kota Denpasar, Bali;
9. 1 unit Reefer Container di PT Karya Karimun Mandiri, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
10. 1 unit Reefer Container di PT Sarana Patra Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah; dan
11. 1 unit Cold Storage Bawang Merah di Perumda Varia Niaga, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

3.7. Fasilitasi Distribusi Pangan

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen dan konsumen. Tujuan kegiatan SPHP melalui FDP untuk melindungi harga pembelian bahan pangan di tingkat produsen (petani/peternak/poktan/gapoktan/distributor/ pemasok/pelaku usaha pangan lainnya) dengan harga yang layak dan menguntungkan, serta melindungi harga penjualan bahan pangan di tingkat konsumen dengan harga yang wajar. Di tingkat produsen yang merupakan wilayah surplus, gejolak pasokan dan harga pangan dapat terjadi apabila harga pangan yang dihasilkan terutama saat panen raya jatuh di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi. Sebaliknya gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen terjadi bila terjadi kenaikan harga pangan di atas HET atau HAP Tingkat Konsumen atau harga wajar tingkat pasar.

Gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen umumnya terjadi pada saat permintaan produk pangan meningkat drastis yang biasa terjadi pada saat perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), pasokan berkurang akibat belum musim panen, dan

terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Realisasi pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)

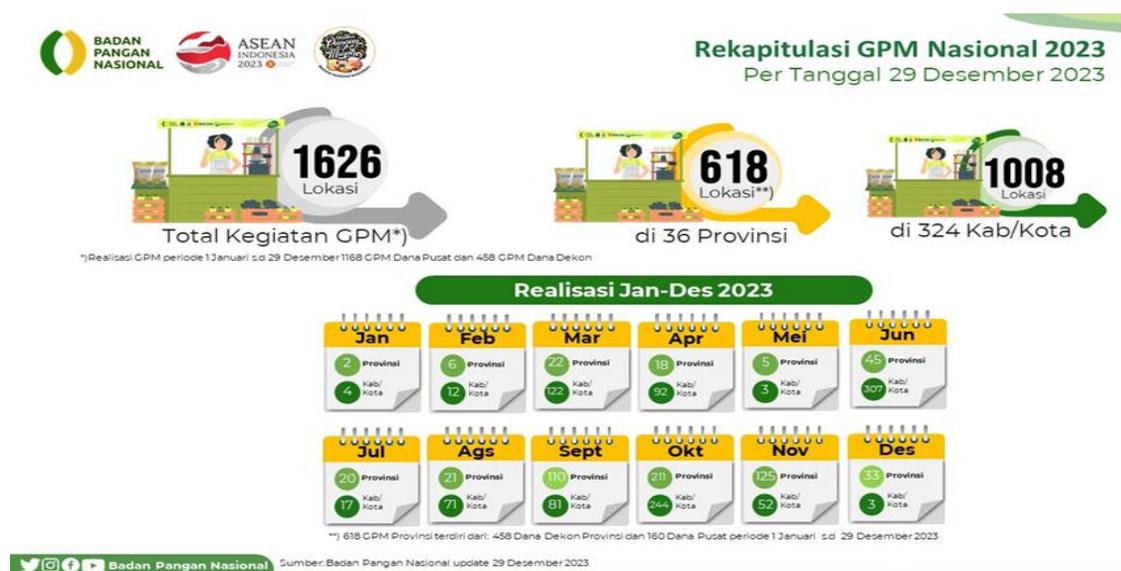
Realisasi Fasilitas Distribusi Pangan hingga tanggal 31 Desember 2023 sudah terealisasi sebanyak 2,63 juta kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu jagung sebanyak 1,17 juta kg, kemudian kedelai sebanyak 645.672 kg. Selain jagung dan kedelai, komoditas pangan lainnya yang difasilitasi distribusinya adalah beras, bawang merah, minyak goreng, gula, telur ayam ras, tepung terigu, daging ayam ras, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Adapun pelaksanaan FDP pada tahun 2023 menggunakan 2 (dua) mata anggaran yaitu dengan menggunakan anggaran FDP sebesar 2.439.311 kg dan anggaran pengangkutan bahan pangan sebesar 195.197 kg.

3.8. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Adapun ruang lingkup kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2023, meliputi: kegiatan GPM di 34 provinsi dan 216 Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran dari APBN Badan Pangan Nasional baik di Pusat maupun Dekonsentrasi Kegiatan GPM dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, petani/peternak/

gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen. Beberapa indikator pelaksanaan GPM meliputi: (i) terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan; (ii) faktor isu nasional, menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional; (iii) kebijakan harga pemerintah (Harga Pembelian Pemerintah, Harga Acuan Pembelian/Harga Acuan Penjualan dan Harga Eceran Tertinggi (HET), (iv) indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai *early warning system*.

Komoditas pangan pokok strategis pada kegiatan GPM antara lain adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) seperti beras, gula, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan petani/peternak/poktan/gapoktan, serta komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan. Adapun tujuan kegiatan GPM adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen dan meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat. Total pelaksanaan GPM sepanjang tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 9. Gerakan Pangan Murah (GPM)

3.9. Pemantauan Harga di Tingkat Produsen dan Tingkat Konsumen

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap informasi harga pangan, Bapanas telah mengembangkan inovasi layanan data harga pangan secara online melalui aplikasi panel harga pangan. Dengan layanan ini mewujudkan satu data pangan

sebagai basis pengambilan kebijakan menuju pangan kuat Indonesia berdaulat. Pengumpulan data harian sesuai metode dan mengirimkan data secara harian kepada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedeputusan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional melalui Website/Aplikasi Panel Harga Pangan (<https://panelharga.badanpangan.go.id>) atau dengan aplikasi android Panel Harga Pangan (<https://bit.ly/CMSAplikasiPanelHargaBAPANAS>). Dalam hal periode pelaporan panel harga meliputi periode harian, bulanan maupun tahunan.

Pada Tahun 2023 kegiatan Panel Harga Pangan dilaksanakan di 34 Provinsi dengan jumlah enumerator produsen sebanyak 342 orang, enumerator konsumen 508 orang, enumerator grosir/pusat 6 orang dan pengelola database provinsi 34 orang. Secara keseluruhan jumlah enumerator dan pengelola database pada tahun 2023 adalah sebanyak 890 orang.



Gambar 10. Panel Harga Pangan

Secara keseluruhan, harga pangan pokok dan strategis di tingkat produsen sepanjang tahun 2023 dapat dikatakan cukup stabil, meskipun pada akhir tahun sempat terjadi fluktuasi harga pangan akibat dampak *el nino* maupun kenaikan biaya input produksi. Komoditas yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi di atas HPP/HAP Tk. Produsen adalah gabah, beras dan jagung, sementara komoditas yang harganya di bawah HAP Tk. Produsen adalah Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup, dan Bawang Merah.

Adapun harga pangan pokok dan strategis di tingkat konsumen sepanjang tahun 2023 juga cukup stabil. Adapun harga rata-rata tahun 2023 yang berada di atas HET/HAP Tk. Konsumen adalah Beras Medium, Kedelai, dan Jagung. Pada akhir tahun secara umum terjadi fluktuasi harga di tingkat konsumen disebabkan gangguan produksi akibat dampak *el nino*, kenaikan biaya input produksi, serta pengaruh geopolitik global.

Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat produsen per 31 Desember 2023 untuk komoditas tertentu di bawah HPP/HAP yaitu Bawang merah (5,00% < HAP) dan Sapi Hidup (8,93% < HAP). Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat produsen per 31 Desember 2023 untuk komoditas tertentu di bawah HPP/HAP yaitu Bawang merah (5,00% < HAP) dan Sapi Hidup (8,93% < HAP).



Gambar 11. Harga Pangan Tingkat Produsen

Sedangkan komoditas lain harga rata - rata nasional di atas HPP/HAP yaitu gabah kering panen (GKP) tingkat petani, gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan, beras medium, beras premium, jagung pipilan, kedelai biji kering, cabai merah keriting, cabai rawit merah, ayam ras, dan telur ayam ras.



Gambar 12. Harga Pangan Tingkat Konsumen

Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen per 31 Desember 2023 untuk komoditas dengan harga 10% di atas HET/HAP meliputi: beras medium zona 3 (29,04% > HET), beras premium zona 3 (18,68% > HET), beras medium zona 2 (19,03% > HET), beras medium zona 1 (17,03% > HET), kedelai biji kering (12,59% > HAP), jagung tingkat peternak (53,72% > HAP), cabai rawit merah (43,70% > HAP).

3.10. Capaian Kinerja Keuangan

Pagu anggaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023 sebesar Rp139.426.877.000,- dengan realisasi anggaran sd per 31 Desember 2023 sebesar Rp135.198.290.922,- atau 96,97% (Aplikasi SAKTI per tanggal 11 Januari 2024).

Perkembangan alokasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 dan Tahun 2023, sebagai tabel berikut.

Tabel 11. Perkembangan Alokasi Anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Kegiatan	Pagu Anggaran 2022 (Rp)	Pagu Anggaran 2023 (Rp)	% Kenaikan
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	109.616.600.000	139.426.877.000	27,19

Pada tahun 2023, alokasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengalami kenaikan sebesar 27,19% dari tahun 2022. Kenaikan anggaran tersebut berkaitan dengan dukungan kegiatan prioritas dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023, pada masing-masing Direktorat dialokasikan anggaran dengan capaian realisasi seperti tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi Anggaran pada Direktorat Lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023.

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.	Direktorat Ketersediaan Pangan	22.944.578.000	21.914.914.968	95,51
2.	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	74.581.020.000	72.397.723.153	97,07
3.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	41.901.279.000	40.885.652.801	97,58
	Total Anggaran	139.426.877.000	135,198.290.922	96,97

Sumber: Aplikasi SAKTI

Berdasarkan tabel di atas nilai kinerja realisasi pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp135.198.290.922,- atau 96,97% (Aplikasi SAKTI per tanggal 11 Januari 2024). Permasalahan yang utama dalam melakukan pencairan anggaran pusat dan daerah adaah tidak sesuai rencana penarikan setiap bulannya, namun demikian pelaksanaan teknis sesuai jadwal yang ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2023. Laporan Tahunan ini memuat gambaran tentang pelaksanaan program/kegiatan atas target dan hasil capaian kinerja serta langkah strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2023 telah menunjukkan kiprahnya dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memperkuat cadangan pangan pemerintah dalam pencapaian target pembangunan pangan nasional. Namun demikian, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian dan memperbaiki kualitas kinerja, utamanya dalam meningkatkan ketersediaan pangan untuk menjaga pasokan dan harga pangan serta memperkuat cadangan pangan pemerintah sehingga inflasi pangan bergejolak dapat terkendali.

Kiranya Laporan Tahunan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang.